

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada konferensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan di Kairo (ICPD, 1994), menegaskan bahwa pembangunan tidak bisa lagi bersifat tunggal, hanya dari sisi ekonomi, meskipun penting tidak akan cukup untuk menghadapi bebarbagai persoalan yang dihadapi masyarakat global. Spektrum pembangunan jauh lebih luas dari sekedar urusan ekonomi. Pembangunan juga harus memperhatikan masalah lingkungan dan kependudukan.

Wacana pembangunan berkelanjutan yang dikaitkan dengan lingkungan dalam perbincangan global lahir pertemuan antarnegara secara periodik untuk membahas isu-isu besar terkait masalah pembangunan berkelanjutan antara lain: (1). *UN Conferemce on Human Environmental* (Stockhom, 1972); (2). *Bruntland Commision Report* (1983); (3). *Our Common Future* (1992); (4). *Earth Summit* (1992); (5). *Rio Declaration on Environmental and Developmment* (1992); (6). *Agenda 21* (1992); (7). *Convention on Biological Diversity* (1992); (8). *ICPD Programme of Action* (1994); (9). *Lisbon Priciples* (1997); (10). *Earth Charter* (2000); (11). *UN Milenium Declaration* (2000); (12). *KTT Pembangunan Berkelanjutan / Rio* (2002); (13). *Milenium Ecology Assesment* (2005); (14) *Rio+20* (2012). Dan lainnya.

Konferensi Tingkat Tinggi *Archipelagic and Island States* (AIS) yang diadakan di Bali pada 11 Oktober 2023 menghasilkan kesepakatan dari 32 negara kepulauan untuk memperkuat kerja sama dalam menghadapi tantangan global. Fokus utama dalam pertemuan ini adalah ancaman perubahan iklim, kenaikan permukaan laut, serta pencemaran laut akibat sampah dan limbah. Prinsip solidaritas, kesetaraan, dan inklusivitas menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan yang tidak hanya berdampak pada ekosistem laut, tetapi juga keberlanjutan wilayah negara. Kesepakatan ini menunjukkan urgensi tindakan bersama guna menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan di pulau-pulau kecil yang rentan terhadap perubahan iklim.

Di sisi lain, peningkatan jumlah penduduk menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan sumber daya alam. Data *United Nations* (2025), Populasi dunia saat ini yang berjumlah 7,6 miliar diperkirakan akan mencapai 8,6 miliar pada 2030, 9,8 miliar pada 2050, dan 11,2 miliar pada 2100, akibatnya persaingan atas sumber daya alam akan semakin ketat, yang berpotensi memperparah ketimpangan sosial. Hal ini sejalan dengan teori Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk meningkat secara eksponensial, sedangkan ketersediaan sumber daya hanya bertambah secara linear. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2025 tercatat mencapai 286 juta jiwa. Lebih lanjut, BPS memproyeksikan pertumbuhan populasi akan terus meningkat hingga mencapai rentang 300 juta hingga 329 juta jiwa pada tahun 2050. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pemerataan pembangunan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan guna

memastikan kesejahteraan masyarakat di tengah tekanan terhadap lingkungan yang semakin berat.

Pendidikan lingkungan menurut UNESCO berfokus pada pendekatan holistik dan transformatif yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi dalam pembelajaran untuk menciptakan masyarakat berkelanjutan. Prinsip utamanya mencakup keterkaitan antara lingkungan dan pembangunan, pendekatan interdisipliner, serta penanaman nilai-nilai etika dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Pendidikan ini bersifat partisipatif dengan mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam pemecahan masalah nyata, menggunakan metode inovatif yang berbasis pengalaman, serta menanamkan konsep pembelajaran seumur hidup. Implementasinya dapat dilakukan melalui integrasi dalam kurikulum sekolah dan universitas, kegiatan ekstrakurikuler, kebijakan pendidikan nasional, serta keterlibatan komunitas bersama berbagai pemangku kepentingan. UNESCO telah merumuskan berbagai pedoman, seperti *Education for Sustainable Development (ESD) 2030 Framework*, *The Belgrade Charter (1975)*, dan *Tbilisi Declaration (1977)*, yang menjadi dasar dalam pendidikan lingkungan secara global.

Di Indonesia, pendidikan lingkungan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu lingkungan melalui kebijakan, kurikulum, dan berbagai program. Pemerintah telah memasukkan pendidikan lingkungan dalam regulasi seperti UU No. 32 Tahun 2009 serta mengembangkan program Adiwiyata untuk mendorong Sekolah berbudaya lingkungan. Di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), pendidikan lingkungan diintegrasikan dalam mata pelajaran seperti IPA dan Geografi,

serta melalui program ekstrakurikuler dan Sekolah Hijau. Perguruan tinggi juga berperan penting dalam penelitian dan pengembangan ilmu lingkungan, serta dalam pengabdian masyarakat untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.

Selain pendidikan formal, berbagai organisasi dan komunitas turut aktif dalam edukasi lingkungan melalui program non-formal seperti bank sampah dan kampanye pengurangan plastik. Namun, tantangan utama masih berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan perlunya sinergi antara berbagai pihak untuk memperkuat pendidikan lingkungan. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan media sosial, pendidikan lingkungan di Indonesia berpotensi menjangkau lebih banyak orang dan mendorong perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan.

Pendidikan lingkungan masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Kurangnya integrasi dalam kurikulum menyebabkan pendidikan lingkungan hanya diajarkan secara parsial dan tidak menyeluruh di berbagai mata pelajaran. Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya di sekolah, serta kurangnya pelatihan bagi guru membuat pendidikan lingkungan kurang optimal dalam menanamkan nilai-nilai keberlanjutan. Lemahnya implementasi kebijakan dan masih kuatnya budaya yang tidak ramah lingkungan juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti mengintegrasikan pendidikan lingkungan dalam berbagai mata pelajaran, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye

edukatif, serta menyediakan sumber daya dan fasilitas yang memadai di sekolah. Pelatihan guru yang berkelanjutan juga penting agar metode pengajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Selain itu, penguatan implementasi kebijakan dan pendekatan berbasis kearifan lokal dapat membantu membangun kesadaran lingkungan yang lebih baik di masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, pendidikan lingkungan di Indonesia dapat berkembang lebih baik dan berkontribusi pada terciptanya generasi yang peduli terhadap kelestarian alam.

Pendidikan memiliki peran penting dalam mengubah perilaku karena melalui proses belajar, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang membentuk pola pikir serta tindakannya. Dengan pendidikan, seseorang dapat memahami perbedaan antara perilaku yang positif dan negatif, sehingga mampu mengambil keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan juga menanamkan norma sosial dan etika yang membantu individu berinteraksi dengan lingkungan secara lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan bukan hanya sekadar transfer ilmu, tetapi juga proses yang membentuk karakter serta perilaku sebagai warga negara.

Perilaku warga negara atau *Citizenship Behavior* (CB) berperan penting dalam meningkatkan pendidikan lingkungan dengan mendorong kesadaran, inisiatif, dan partisipasi aktif individu di luar tugas formalnya. Individu dengan CB tinggi cenderung menyebarkan informasi lingkungan, menginisiasi program keberlanjutan, serta mendukung implementasi kebijakan ramah lingkungan di institusi pendidikan. Selain itu, setiap warga negara

membantu membangun budaya kerja sama di masyarakat, sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda dalam menjaga lingkungan. Sebagaimana Robbins & Judge (2017) juga menegaskan bahwa CB merupakan perilaku sukarela yang bukan merupakan bagian dari persyaratan kerja formal namun dapat meningkatkan efektivitas fungsi organisasi.

Citizenship Behavior Toward Environment (CBE) dalam pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter peserta didik yang peduli terhadap lingkungan. Perilaku ini mencerminkan tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjaga keseimbangan ekosistem melalui tindakan sukarela, seperti mengurangi sampah, menghemat energi, dan berpartisipasi dalam program penghijauan. Dalam konteks pendidikan, CBE dapat ditanamkan melalui kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan ekstrakurikuler, serta budaya sekolah yang mendukung keberlanjutan. Lebih lanjut Y. Li et al (2024), mengemukakan bahwa peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik tetapi juga kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya.

Berdasarkan data resmi per April 2025, volume timbunan sampah di Kota Bima mencapai 80,68 ton per hari, atau setara dengan akumulasi sebesar 29.448 ton per tahun. Dari total volume tersebut, kapasitas penanganan sampah pemerintah daerah baru mencapai 78% (62,93 ton per hari), yang dilakukan melalui pola konvensional "kumpul-angkut-buang". Angka ini masih berada di bawah target 80% yang ditetapkan dalam program NTB Zero Waste. Meningkatnya timbunan sampah tidak seiring dengan peningkatan pengelolaan sampah. Hal ini dapat diakibatkan karena rendahnya rasa

kepedulian manusia terhadap lingkungan.

Data studi pendahuluan (Mei 2024) menunjukkan bahwa beban administratif yang tinggi menjadi hambatan utama dalam keterlibatan guru terhadap isu lingkungan, sebagaimana dinyatakan oleh 63% responden. Rendahnya inisiatif mandiri tercermin dari fakta bahwa 74% aktivitas pelestarian lingkungan bersifat instruksional dan bergantung pada kebijakan formal sekolah. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran tanggung jawab (*diffusion of responsibility*), di mana guru cenderung memandang pengelolaan lingkungan sebagai ranah tugas petugas kebersihan dibandingkan sebagai tanggung jawab kolektif.

Rendahnya rasa kepedulian terhadap lingkungan menjadi penyebab utama berbagai permasalahan lingkungan dapat terjadi. Kunci utama untuk menangani permasalahan lingkungan adalah dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Salah satu usaha paling efektif untuk ini adalah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan sarana yang tepat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mengenai peduli lingkungan (Wulansari, Tjahjono, and Sanjoto 2020). Pendidikan menjadi dasar manusia dalam bertindak. Pemerintah melaksanakan program pendidikan karakter untuk membentuk 18 karakter peserta didik, salah satunya adalah peduli lingkungan. Pendidikan karakter diharapkan mampu menumbuhkan perilaku bijak terhadap lingkungan (Alawiyah 2012).

Selain itu, CBE dalam pendidikan membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat dan kondusif. Sekolah yang menerapkan prinsip CBE cenderung memiliki lingkungan yang lebih bersih dan hijau, yang berdampak

positif terhadap kesehatan fisik dan mental siswa. Guru dan tenaga pendidik juga memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai ini melalui teladan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya integrasi CBE dalam pendidikan, generasi muda diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan, baik di tingkat lokal maupun global.

Keberlanjutan lingkungan menjadi salah satu isu krusial yang memerlukan perhatian serius. Salah satu faktor yang dapat mendukung keberlanjutan ini adalah *citizenship behavior toward environment* (CBE) atau perilaku bijak terhadap lingkungan. CBE mencerminkan tindakan sukarela warga negara dalam menjaga, melestarikan, dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitarnya. Dalam konteks sekolah, CBE sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk kepemimpinan guru (*teacher leadership*), motivasi kerja (*work motivation*), dan keadilan lingkungan (*environmental justice*).

Teacher leadership memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku peserta didik serta komunitas sekolah terhadap lingkungan. Guru yang memiliki kepemimpinan kuat tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan agen perubahan yang mampu menanamkan kesadaran lingkungan dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya kepemimpinan guru yang efektif, peserta didik dapat lebih mudah mengadopsi nilai-nilai positif terkait pelestarian lingkungan.

Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa *teacher leadership* memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kinerja pendidikan,

termasuk kepuasan kerja guru, keterlibatan siswa, dan efektivitas pembelajaran. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam penelitian mengenai bagaimana kepemimpinan guru dapat berkontribusi terhadap perilaku kewarganegaraan dalam konteks pendidikan, terutama jika dikombinasikan dengan faktor motivasi dan keadilan lingkungan.

Selain kepemimpinan guru, motivasi kerja (*work motivation*) juga menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam membentuk CBE. Motivasi kerja yang tinggi mendorong guru untuk berkontribusi lebih dalam membangun lingkungan sekolah yang ramah lingkungan. Guru yang termotivasi akan lebih aktif dalam merancang dan mengimplementasikan program-program lingkungan, seperti kegiatan daur ulang, penghijauan, dan pengelolaan limbah di sekolah. Motivasi kerja yang baik dapat diperoleh dari berbagai faktor, termasuk dukungan manajemen sekolah, apresiasi terhadap kinerja, serta kondisi kerja yang nyaman. Individu yang memiliki motivasi tinggi, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik, cenderung menunjukkan sikap proaktif dalam mendukung tujuan bersama.

Dalam konteks sekolah, Podsakoff dkk (2000) guru yang memiliki motivasi tinggi tidak hanya melaksanakan tugas pokoknya dengan baik, tetapi juga secara sukarela melakukan tindakan yang mendukung lingkungan pendidikan yang lebih harmonis dan produktif. Demikian pula, siswa yang termotivasi akan lebih cenderung menunjukkan perilaku prososial, seperti membantu teman sekelas, berkontribusi dalam diskusi, serta menjaga lingkungan sekolah.

Sementara itu, konsep *environmental justice* atau keadilan lingkungan

juga berperan dalam meningkatkan CBE. Keadilan lingkungan mencerminkan sejauh mana setiap individu dalam komunitas sekolah memiliki akses yang setara terhadap sumber daya lingkungan dan bagaimana distribusi manfaat maupun risiko lingkungan dibagi secara adil. Jika warga sekolah merasa bahwa lingkungan mereka dikelola dengan adil dan tidak ada pihak yang dirugikan, maka partisipasi mereka dalam menjaga lingkungan akan lebih tinggi.

Namun, dalam realitasnya, masih terdapat berbagai tantangan dalam mengembangkan CBE di lingkungan sekolah. Banyak guru yang belum memahami pentingnya peran mereka sebagai pemimpin dalam pendidikan lingkungan. Selain itu, motivasi kerja yang rendah akibat beban administrasi yang tinggi, kurangnya apresiasi, serta keterbatasan fasilitas juga menjadi kendala dalam mendorong perilaku bijak terhadap lingkungan. Ditambah lagi, ketidakadilan dalam pengelolaan lingkungan sekolah, seperti ketimpangan dalam akses terhadap fasilitas ramah lingkungan, dapat menghambat partisipasi aktif seluruh warga sekolah dalam menjaga lingkungan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas faktor-faktor yang berkontribusi terhadap CBE, tetapi masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Sebagian besar studi lebih berfokus pada faktor individual, seperti kesadaran lingkungan dan sikap terhadap lingkungan, tanpa melihat pengaruh kepemimpinan guru, motivasi kerja, dan keadilan lingkungan secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana ketiga faktor tersebut mempengaruhi CBE dalam lingkungan sekolah.

Pentingnya penelitian ini terletak pada implikasinya terhadap kebijakan pendidikan dan praktik pengelolaan lingkungan sekolah. Dengan memahami faktor-faktor yang mendorong CBE, sekolah dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam membangun budaya peduli lingkungan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam merancang program pelatihan kepemimpinan bagi guru serta kebijakan yang mendorong keadilan lingkungan di sekolah.

Secara metodologis, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara *teacher leadership*, *work motivation*, dan *environmental justice* terhadap CBE. Data akan dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan kepada guru di berbagai sekolah. Analisis statistik akan digunakan untuk mengidentifikasi hubungan dan pengaruh antar variabel.

Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi CBE serta memberikan rekomendasi praktis bagi sekolah dan pemangku kebijakan. Dengan meningkatkan kepemimpinan guru, memperbaiki motivasi kerja, dan menegakkan keadilan lingkungan, sekolah dapat menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Dengan mengkaji keterkaitan antara *teacher leadership*, *work motivation*, dan *environmental justice* terhadap *citizenship behavior toward environment*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih efektif. Temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi para pemangku kepentingan dalam dunia

pendidikan, termasuk kepala sekolah, guru, dan pembuat kebijakan, untuk merancang strategi yang lebih baik dalam meningkatkan keterlibatan serta kontribusi positif individu di lingkungan pendidikan. Sehingga penelitian ini tidak hanya memiliki implikasi akademik, tetapi juga manfaat praktis dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih harmonis dan produktif.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: (1) apakah *teacher leadership* berpengaruh terhadap *citizenship behavior toward environment*? (2) apakah *stress* berpengaruh terhadap *job performance*? (3) apakah *work motivation* berpengaruh terhadap *citizenship behavior toward environment*? (4) apakah *environmental justice* berpengaruh terhadap *citizenship behavior toward environment*? (5) bukankah moral lingkungan berpengaruh terhadap *integritas guru*? (6) bukankah pengambilan keputusan berpengaruh terhadap komitmen organisasi? (7) apakah kepemimpinan guru juga berpengaruh terhadap motivasi? (8) apakah kecerdasan naturalis berpengaruh terhadap kebijakan lingkungan? (9) apakah kepemimpinan guru berpengaruh terhadap *citizenship behavior toward environment* melalui *motivation*? (10) apakah kepemimpinan guru berpengaruh terhadap *citizenship behavior toward environment* melalui *environmental justice*? (11) bukankah *stress* berpengaruh terhadap *citizenship behavior*? (12) bagaimana *ability* berpengaruh terhadap komitmen organisasi? (13) bagaimana literasi lingkungan berpengaruh terhadap *taks performance*? (14) apakah *job satisfaction* berpengaruh terhadap *citizenship behavior*?

C. Pembatasan Penelitian

Mengingat ruang lingkup masalah yang cukup kompleks dan disebabkan karena keterbatasan waktu, dana dan fasilitas, maka lingkup penelitian harus dibatasi. Maka, penelitian ini dibatasi dalam mengkaji pengaruh variabel bebas yang terdiri dari: *teacher leadership*, *work motivation* dan *environmental justice* terhadap *citizenship behavior toward environment* (CBE) sebagai variabel terikat di SMP Negeri sekota Bima Nusa Tenggara Barat (NTB). Adapun variabel lain (selain *teacher leadership*, *work motivation*, *environmental justice* dan *citizenship behavior toward environment*) tidak dianalisis dalam penelitian ini.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang dijelaskan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *teacher leadership* berpengaruh langsung terhadap *work motivation*
2. Apakah *Teacher Leadership* berpengaruh langsung terhadap *Environmental Justice*
3. Apakah *teacher leadership* berpengaruh langsung terhadap *citizenship behavior toward environment*
4. Apakah *work motivation* berpengaruh langsung terhadap *citizenship behavior toward environment*
5. Apakah *environmental justice* berpengaruh langsung terhadap *citizenship behavior toward environment*
6. Apakah *teacher leadership* berpengaruh tidak langsung terhadap

citizenship behavior toward environment melalui *work motivation*

7. Apakah *teacher leadership* berpengaruh tidak langsung terhadap *citizenship behavior toward environment* melalui *environmental justice*

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *teacher leadership*, *work motivation*, dan *environmental justice* terhadap *citizenship behavior toward environment* dalam konteks pendidikan. Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kepemimpinan pendidikan, psikologi organisasi, dan perilaku sosial. Secara spesifik, manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

a. Penguatan Model Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya teori kepemimpinan guru (*teacher leadership*) dengan menguji sejauh mana gaya kepemimpinan berkontribusi terhadap motivasi dan keadilan lingkungan di sekolah. Selanjutnya mengembangkan pemahaman mengenai hubungan antara motivasi kerja dan keadilan lingkungan dalam mempengaruhi perilaku kewarganegaraan terhadap lingkungan (*citizenship behavior toward environment*).

b. Kontribusi pada Studi Sebelumnya

Memberikan bukti empiris yang mendukung atau mengkritisi penelitian sebelumnya terkait faktor-faktor yang mendorong perilaku kewarganegaraan terhadap lingkungan di lingkungan pendidikan. Kemudian mengidentifikasi interaksi antara *teacher leadership*, *work motivation*, dan *environmental justice*, serta bagaimana faktor-faktor mempengaruhi *citizenship behavior toward environment*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga memiliki implikasi praktis yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan, antara lain:

a. Bagi Guru dan Kepala Sekolah

Memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pentingnya kepemimpinan guru dalam membangun lingkungan yang adil dan memotivasi peserta didik serta rekan sejawat. Kemudian menjadi acuan dalam merancang strategi kepemimpinan yang dapat meningkatkan perilaku kewarganegaraan dalam komunitas sekolah.

b. Bagi Pembuat Kebijakan Pendidikan

Memberikan dasar bagi kebijakan yang mendukung penguatan kepemimpinan guru, peningkatan motivasi tenaga pendidik, serta penerapan keadilan lingkungan dalam sistem pendidikan. Selanjutnya menyediakan bukti empiris untuk merancang kebijakan yang dapat meningkatkan perilaku kewarganegaraan terhadap lingkungan di sekolah, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan

secara keseluruhan.

c. Bagi Peneliti Lain

Menyediakan referensi dan data empiris yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut terkait *teacher leadership*, *work motivation*, *environmental justice*, dan *citizenship behavior toward environment*.

Selanjutnya membuka ruang eksplorasi bagi penelitian lanjutan yang dapat memperdalam atau memperluas cakupan kajian, misalnya dengan mempertimbangkan variabel lain yang mungkin berperan dalam pengaruh tersebut.

